

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR: 050/ 5 /401.013/2023

TENTANG

RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
28. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya bagi segenap pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 Juli 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk periode satu tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Madiun. Oleh karena itu, penyusunan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- aa. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- bb. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

cc. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah

1. memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023;
2. memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2024; dan
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah

1. sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
2. tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut:

Penetapan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
- BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MADIUN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.1.2.02.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/Bulan	- (indikator kinerja berbeda)	9 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	100%	10 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	190%
4.1.1.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	425%	100%	300%	300%
4.1.1.2.06.9.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	- (indikator kinerja berbeda)	12 Laporan	51 Laporan	425%	12 Laporan	75 Laporan	625%
4.1.1.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
4.1.1.2.07.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	-	-	0%	0 Unit	0 Unit	0%
4.1.1.2.07.6.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	3 Unit	100%
4.1.1.2.07.10.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	-	-	0%	0 Unit	0 Unit	0%
4.1.1.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.1.2.08.03.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	- (indikator kinerja berbeda)	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
4.1.1.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
4.1.1.2.09.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	8 Unit	100%
4.1.1.2.09.9.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
4.1.1.2.09.10.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	- (indikator kinerja berbeda)	21 Unit	21 Unit	100%	40 Unit	61 Unit	152,5%
4.1.2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	80	80	80	85,572	106,965%	86		
4.1.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.1.2.03.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	- (indikator kinerja berbeda)	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	20 Dokumen	41 Dokumen	205%

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat daerah n-2 (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah n-2 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.1.2.03.2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	- (indikator kinerja berbeda)	20 Kasus	20 Kasus	100%	25 Kasus	45 Kasus	180%
4.1.2.03.3.	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	- (indikator kinerja berbeda)	400 Dokumen	421 Dokumen	105%	400 Dokumen	821 Dokumen	205,25%

Pada saat penyusunan target kinerja Renstra Perangkat Daerah akhir periode terdapat kesalahan penetapan target. Target yang ditetapkan pada akhir periode merupakan target kinerja Renja tahun n saja, bukan hasil dari penjumlahan target Renja n-1, n-2, dan n-3. Sehingga, tingkat capaian realisasi target Renstra yang diperoleh menjadi terlalu besar. Selain itu, pada tahun n-2 terdapat perubahan indikator kinerja. Maka, realisasi capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan (n-1) tidak memperhitungkan realisasi target kinerja pada tahun n-3. Namun demikian, tetap dapat diperoleh gambaran capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Renstra di atas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah, yaitu:

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - c. Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - d. Faktor penghambat:
 - Keterbatasan anggaran APBD Kota Madiun sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
2. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan:
 - a. Program
 - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Kegiatan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
 - c. Sub Kegiatan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
- d. Faktor pendorong:
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai target dikarenakan banyaknya undangan rapat koordinasi/konsultasi/sosialisasi/bimbingan teknis yang dipenuhi.
 - Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum mencapai target dikarenakan banyaknya permohonan penelitian produk hukum daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah, sehingga produk hukum yang didokumentasikan mengalami peningkatan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Perangkat Daerah:
- a. Program yang tidak tercapai/memenuhi target
- NIHIL-
- b. Program yang memenuhi atau melebihi target
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun memiliki 2 (dua) Program, dan keduanya telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja Program.
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Target pada tahun 2022 adalah 81 dan terealisasi dengan skor 82,85 atau capaian kinerja sebesar 102,28%.
- ii. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Madiun mencapai nilai IKM sebesar 84,038. Sedangkan pada tahun 2022, penilaian tidak lagi menjadi satu, namun per Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Madiun. Tahun 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendapat nilai IKM sebesar 85,572.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:
- a. Tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja
- Realisasi kinerja yang tidak tercapai terdapat pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah. Selain itu, untuk kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, apabila rencana pengadaan kendaraan dinas tidak dapat terealisasi maka akan mempengaruhi target akhir Renstra yang telah memperhitungkan jumlah kendaraan yang baru.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan skala prioritas alokasi anggaran kegiatan, agar tidak menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

- b. Realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja
Realisasi kinerja yang memenuhi atau melebihi target kinerja adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, kecuali kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Target nilai SAKIP Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun 2022 adalah 81 dan terealisasi dengan perolehan nilai 82,85 atau persentase capaian 102,28%. Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian adalah dengan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dll), melakukan analisis, evaluasi, dan upaya tindak lanjut melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) maupun Laporan Realisasi Kinerja Personal melalui MSKP.
 - ii. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Madiun mencapai nilai IKM sebesar 84,038. Pada tahun 2022 penilaian tidak lagi menjadi satu, namun per Bagian Sekretariat Daerah Kota Madiun. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun 2022 mendapat nilai IKM sebesar 85,572.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian adalah dengan menerima saran dan rekomendasi perbaikan, kemudian melaksanakan evaluasi tersebut dan didokumentasikan dalam Dokumen Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Selain itu, perlu diberlakukan *Reward and Punishment* bagi penyedia layanan agar semakin memotivasi dalam memberikan pelayanan prima.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tertuang di dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Tugas Pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
- f. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- i. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator yang menjadi tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi:

1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah: Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Reformasi Birokrasinya bernilai Baik
 - a. Penjelasan: Merupakan persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi bernilai baik. Sumber data dari Inspektorat Kota Madiun.
 - b. Rumus Perhitungan: Jumlah Perangkat Daerah yang Indeks Reformasi Birokrasinya bernilai Baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikalikan 100%
2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah 1: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 - a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sumber data dari Inspektorat Kota Madiun
 - b. Rumus Perhitungan: Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran Perangkat Daerah 2: Nilai Hasil Evaluasi Kinerja

- a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- b. Rumus Perhitungan: Nilai hasil evaluasi kinerja Perangkat Da

Indikator Sasaran Perangkat Daerah 3.1: Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik

- a. Penjelasan: Merupakan persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya bernilai baik. Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.
- b. Rumus Perhitungan: Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya bernilai baik dibagi Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik dikali 100%

Indikator Sasaran Perangkat Daerah 3.2: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

- a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.

- b. Rumus Perhitungan: Nilai IKM Perangkat Daerah
- 3. Indikator Program Perangkat Daerah 1: Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
 - a. Penjelasan: Merupakan nilai yang diambil dari nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.
Rumus Perhitungan: Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
 - Indikator Program Perangkat Daerah 2: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Penjelasan: Merupakan indeks yang diambil dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sumber data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun.
 - b. Rumus Perhitungan: Nilai IKM Perangkat Daerah
- 4. Indikator SPM Perangkat Daerah: -
 - a. Penjelasan: -
 - b. Rumus perhitungan: -
- 5. Indikator LPPD yang diampu: -
 - a. Penjelasan: -
 - b. Rumus perhitungan: -

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2 (2022)	tahun n-1 (2023)	tahun n (2024)	tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		81	83	83,50	-	82,85		83	83,25	Melebihi target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				√		-	86	86,5	-	85,572		86,5	87	Tercapai

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan di atas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu:

Tabel
Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)
1.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan keselarasan berbagai Dokumen terkait SAKIP yang sangat banyak dan saling terkait; 2. Belum meratanya pemahaman mengenai kinerja untuk seluruh pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. Padahal penjenjangan kinerja diatursampai level individu, antara lain melalui pohon kinerja, penjenjangan Perjanjian Kinerja, sampai evaluasi berkala yang harus dilakukan setiap ASN untuk memenuhi hak dan kewajibannya; 3. SAKIP belum dianggap penting dibandingkan prestasi Kota Madiun yang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan, antara lain Renstra Perubahan, Perjanjian Kinerja, Cascading, Proses Bisnis, Pohon Kinerja, dll; 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan penekanan analisis terhadap capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi, saran, dan upaya peningkatan/tindak lanjut; 3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAKIP; 4. Adanya berbagai aplikasi untuk memudahkan pengelolaan kinerja, antara lain aplikasi MSKP, e-SAKIP, dll
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				√		Sarana dan prasarana yang ada, khususnya terkait gedung/bangunan, kurang menunjang pelayanan, sedangkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tidak dapat mengubah/menambah spesifikasinya dikarenakan pengelolaannya bukan menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun sebelumnya mendapatkan nilai indeks 85,572 dengan kriteria Baik, dengan unsur nilai 3 (tiga) terendah berada pada unsur:

1. Ketersediaan sarana prasarana;
2. Keadilan mendapatkan pelayanan; dan
3. Kesesuaian hasil pelayanan.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:

Tabel
Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Permasalahan	Hambatan
1.	Sumber daya aparatur yang belum memenuhi kebutuhan dalam Peta Jabatan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	a. SDM ASN yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang tertera dalam peta jabatan; b. Beban kerja SDM lebih tinggi dari pada yang seharusnya di Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK).
2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) belum secara menyeluruh pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	a. Belum optimalnya peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun; b. Belum meratanya pemahaman pegawai mengenai Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, walaupun telah dilakukan sosialisasi; c. RB belum dianggap penting dibandingkan prestasi Kota Madiun yang lain.
3.	Kegiatan yang dilaksanakan kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Keterbatasan pagu anggaran yang dialokasikan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Dampak permasalahan dan hambatan dalam pencapaian:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendukung Visi Misi Kepala Daerah, yaitu pada Visi Walikota Madiun yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera” dan Misi pertama “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”. Tujuan Kota Madiun yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*”, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi. Kemudian, sasaran Kota Madiun adalah “Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan”, dengan indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP), dan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dampak dari permasalahan dan hambatan yang terjadi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tersebut dapat menghambat pencapaian target pada lingkup Kota Madiun, khususnya terkait indikator Indeks Reformasi Birokrasi, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Madiun, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP). Permasalahan SDM dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. Oleh karena itu, SDM yang ada dituntut senantiasa meningkatkan kompetensinya. Kinerja juga harus ditetapkan, dievaluasi dan diukur sampai level individu, sehingga masing-masing tugas dan kewajiban dilaksanakan tanpa menunggu perintah atasan.

Permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum secara menyeluruh di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Perangkat Daerah. Oleh karena itu, harus dilakukan optimalisasi peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Permasalahan kegiatan yang dilaksanakan kurang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat menghambat pemenuhan tugas dan kewajiban Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat berdampak besar pada penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun tidak memiliki indikator yang berkaitan dengan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs),

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:

Tabel
Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

No.	Tantangan	Peluang
1.	Profesionalitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM
2.	Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Adanya upaya analisa hukum terhadap produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3.	Perangkat Daerah pemrakarsa kurang memiliki pemahaman terhadap teknik penyusunan produk hukum daerah dan substansi materi produk hukum daerah yang diusulkan	Adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan Perangkat Daerah melalui sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah
4	Adanya gugatan terhadap Pemerintah Daerah	Adanya upaya penyelesaian permasalahan melalui mediasi
5.	Adanya kasus melibatkan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum	Adanya upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, melalui kerja sama dengan OBH/LBH
6.	Kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi hukum/produk hukum secara cepat dan dengan cara yang mudah	Adanya upaya perbaikan media publikasi informasi hukum dan produk hukum daerah yang dikelola Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui media komunikasi dan informasi Pemerintah Kota Madiun

Isu penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas:

1. Isu Penting

- a. Harmonisasi produk hukum daerah;
- b. Fasilitasi bantuan hukum; dan
- c. Pengelolaan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat

2. Rekomendasi Catatan

- a. -
- b. -

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam hal telah dilakukan identifikasi usulan, serta memperhatikan capaian kinerja Perangkat Daerah, maka diperlukan Analisis terkait rancangan awal RKPD yaitu Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, dengan hasil analisis kebutuhan yang akan direncanakan Perangkat Daerah.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A (Skor)	1.984.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A (Skor)	2.251.125.000	Bertambah Rp 267.125.000
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.000.000	-
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	-
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	893.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	945.125.000	Bertambah Rp 52.125.000
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	893.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	945.125.000	Bertambah Rp 52.125.000
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	200.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	341.100.000	Bertambah Rp 141.100.000
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	341.100.000	Bertambah Rp 141.100.000
8.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100%	427.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100%	377.800.000	Berkurang Rp 49.700.000
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	140.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	79.600.000	Berkurang Rp 60.400.000

10.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	137.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	195.600.000	Bertambah Rp 58.100.000
11.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	102.600.000	Berkurang Rp 47.400.000
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	400.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Madiun	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	500.100.000	Bertambah Rp 100.100.000
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	500.100.000	Bertambah Rp 100.100.000
14.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	62.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Madiun	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	86.000.000	Bertambah Rp 23.500.000
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	43.000.000	Bertambah Rp 13.000.000
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Madiun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	-
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Kota Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	40.500.000	Bertambah Rp 10.500.000
18.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,5	1.581.452.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,5	2.506.349.000	Bertambah Rp 916.141.000
19.	Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Kota Madiun	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	1.581.452.000	Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Kota Madiun	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	2.506.349.000	Bertambah Rp 924.897.000
20.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	798.500.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	1.119.256.000	Bertambah Rp 320.756.000
21.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Madiun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	337.502.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Madiun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	647.431.000	Bertambah Rp 309.929.000

22.	Sub Pendokumentasian Pengelolaan Hukum	Kegiatan dan Informasi	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokume n	445.450.000	Sub Pendokumentasian Pengelolaan Hukum	Kegiatan dan Informasi	Kota Madiun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokume n	739.662.000	Bertambah Rp 294.212.000	
Total Pagu Rancangan Awal RKPD						3.565.452.000	Total Pagu Hasil Analisa Kebutuhan						4.757.474.000	Rp 1.192.022.000
Jumlah Program						2	Jumlah Program						2	(Total tambahan pagu anggaran yang dibutuhkan)
Jumlah Kegiatan						7	Jumlah Kegiatan						7	
Jumlah Sub Kegiatan						13	Jumlah Sub Kegiatan						13	

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, yaitu:

- a. Pagu Ranwal SKPD adalah Rp 3.565.452.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2024 sebesar Rp 4.757.474.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sehingga, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 1.192.022.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah);
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu rancangan awal sebesar Rp 1.984.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2024 sebesar Rp 2.251.125.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Analisa kebutuhannya adalah sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Per 1 April 2023 jumlah ASN Bagian Hukum Sekretariat Kota Madiun sejumlah 10 (sepuluh) orang, dari sebelumnya 9 (sembilan) orang. Dengan demikian dibutuhkan tambahan anggaran tambahan penghasilan pegawai per 1 April 2024 bagi 1 (satu) orang pegawai baru tersebut.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 141.100.000 (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah I di Surabaya, rapat koordinasi RANHAM dan Peduli HAM, sidang/penyelesaian sengketa, serta memenuhi undangan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis lainnya.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun berencana untuk menambah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit AC Split, akan dipasang pada ruang arsip menggantikan AC Split sebelumnya yang rusak;
 - 1 (satu) unit LED Smart TV, akan dipasang pada ruang pelayanan;

- 1 (unit) Komputer, untuk menggantikan komputer yang digunakan mengelola website JDIH Kota Madiun yang sudah tidak maksimal kemampuannya;
- 5 (lima) unit Notebook/laptop, untuk menggantikan 4 (empat) unit Notebook/laptop yang rusak berat, dan 1 (unit) untuk dipakai oleh pegawai baru;
- 4 (empat) buah Tablet, untuk digunakan Kepala Bagian dan Subkoordinator dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- 12 (duabelas) unit printer, untuk menggantikan 2 (dua) unit printer yang rusak berat, dan 10 (sepuluh) unit lainnya untuk dipakai oleh pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun yang belum memiliki printer.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut perlu tambahan anggaran sebesar Rp 58.100.000,- (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

- c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pagu rancangan awal sebesar Rp 1.581.452.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan pagu indikatif Renja Tahun 2024 sebesar Rp 2.506.349.000,- (dua milyar lima ratus enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Analisa kebutuhannya adalah sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2024 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun berencana mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah bagi Perangkat Daerah dan Kelurahan, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 320.756.000,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Sebelum terjadi pandemi COVID-19, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di 27 (dua puluh tujuh) kelurahan yang ada. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19 dan adanya *refocusing* anggaran, maka kegiatan penyuluhan hukum hanya dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali, yakni di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Taman, dengan jumlah peserta 155 (seratus lima puluh

lima) orang per kecamatan. Pada tahun 2024, mengingat kondisi sudah memungkinkan, penyuluhan hukum direncanakan akan dilaksanakan kembali di 27 (dua puluh tujuh) kelurahan Kota Madiun. Untuk itu, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 309.929.000,- (tiga ratus Sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum Anggaran pada Ranwal hanya cukup untuk penggandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun yang diberikan kepada 30 (tiga puluh) anggota DPRD Kota Madiun, 309 (tiga ratus sembilan) Ketua RT, dan 74 (tujuh puluh empat) Ketua RW di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan anggaran penggandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun untuk 916 (sembilan ratus enam belas) Ketua RT/RW di wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman. Total tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 294.212.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelenggaraan sesuai Tupoksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

“melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Sub Urusan Bencana dan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah;
6. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundangundangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum;
7. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
8. pelaksanaan penyuluhan hukum;
9. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana Bagian Hukum; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan misinya.

Selanjutnya rumusan tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mengacu pada tujuan Sekretariat Daerah Kota Madiun, yaitu “Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Secara rinci, disusun sebagai berikut:

Visi	: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
Misi ke-1	: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
Tujuan Kota	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>
Sasaran Kota Madiun	: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Prioritas Pembangunan ke-3	: Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis <i>Smart City</i> dan Percepatan Reformasi Birokrasi
Tujuan Perangkat Daerah	: Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Sasaran 1	: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Sasaran 2	: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran 3	: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Rumusan sasaran dan tujuan di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2023

KOTA MADIUN				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis <i>smart cities</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP) 2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	BB Sangat Tinggi

Tabel
Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

Tujuan		Indikator			Target	
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks RB nya bernilai Baik			71,43	
No.	Sasaran	Indikator	Target	Program Pendukung	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,50	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai rerata hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah	90			
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 	100% 83,25	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%

Tabel
Tujuan dan Sasaran
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Program Pendukung	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	83 (A skor)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82	1.274.266.024,-
2.	Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah	Nilai hasil evaluasi pelayanan publik Bagian Hukum	86 (skor)	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	1.340.654.260,-

No.	Sasaran Kinerja	Indikator	Target	Program Pendukung	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%				
4.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	100%				
5.	Meningkatnya pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasi	100%				
Total Anggaran							2.614.920.284,-

3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan, yaitu:
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Tabel T-C.32
Program dan Kegiatan mendukung pencapaian Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√				
2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√				
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√				
4.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√				
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√				
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√				
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√				
8.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
10.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	√				
11.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				
12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√				

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√				
14.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√				
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√				
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	√				
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	√				
18.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	√				
19.	Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	√				
20.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	√				
21.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	√				
22.	Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	√				

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, maka pada Tahun 2024 usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah:

1. Jumlah Usulan :

- a. Program : 2 (dua) Program
- b. Kegiatan : 7 (tujuh) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan : 13 (tigabelas) Sub Kegiatan
- d. Pagu Anggaran : Rp 4.757.474.000,-
- e. Sumber Pendanaan :
 - i. APBD : Rp 4.757.474.000,-
 - ii. APBN : Rp -
 - iii. Lainnya : Rp -
- f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

2. Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, yaitu:

- a. Pagu Ranwal SKPD : Rp 3.565.452.000,-
- b. Selisih anggaran : Rp 1.192.022.000,-
- c. Tambahan untuk :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tambahan anggaran sebesar Rp 52.125.000,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Tambahan Penghasilan Pegawai per 1 April 2024 bagi 1 (satu) orang pegawai baru;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tambahan anggaran sebesar Rp 141.100.000 (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah I di Surabaya, rapat koordinasi RANHAM dan Peduli HAM, sidang/penyelesaian sengketa, serta memenuhi undangan rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis lainnya.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Tambahan anggaran sebesar Rp 58.100.000,- (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit AC Split, 1 (satu) unit LED Smart TV, 1 (unit) Komputer, 5 (lima) unit Notebook/laptop, 4 (empat) buah Tablet, dan 12 (duabelas) unit printer.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Tambahan anggaran sebesar Rp 320.756.000,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah bagi Perangkat Daerah dan Kelurahan, dengan Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Tambahan anggaran sebesar Rp 309.929.000,- (tiga ratus Sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum di 27 (dua puluh tujuh) kelurahan Kota Madiun.

- Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum

Tambahan anggaran sebesar Rp 294.212.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) digunakan untuk pengandaan Lembaran Lepas Peraturan Daerah Kota Madiun bagi 916 (sembilan ratus enam belas) Ketua RT/RW yang ada di wilayah Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel T-C.33
(sesuai SIPD)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Madiun
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Kode					Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	
Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Sasaran)	Tolok Ukur	Target					Pagu Indikatif (Rp)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					A					2.009.005.470				2.628.356.000
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1.000.000				1.500.000
4	1	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Setda	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	6 Laporan	32		1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	6 Laporan	1.500.000
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										945.125.000				1.321.633.000
4	1	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	83	100%	10 Orang/ Bulan	32		945.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	15 Orang/ Bulan	1.321.633.000

									Perangkat Daerah										
4	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									347.330.470					454.500.000
4	1	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	36 Laporan	32	347.330.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	48 Laporan		454.500.000
4	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									141.500.000					255.592.000
4	1	1	2.07	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	0 Unit	32	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	0 Unit		0
4	1	1	2.07	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	19 Unit	32	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	10 Unit		130.110.000
4	1	1	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	32 Unit	32	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	13 Unit		42.182.000
4	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									492.300.000					496.801.000
4	1	1	2.08	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	250 Laporan	32	492.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	250 Laporan		496.801.000

								kantor yang disediakan											
4	1	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								81.750.000						98.330.000
4	1	1	2.09	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	4 Unit	32	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	4 Unit		43.000.000
4	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	1 Unit	32	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	1 Unit		2.500.000
4	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83	100%	22 Unit	32	36.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	43 Unit		52.830.000
4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								2.278.141.000						2.914.079.000
4	1	2	2.03		Kegiatan Fasilitas Dan Koordinasi Hukum								2.278.141.000						2.914.079.000
4	1	2	2.03	1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disusun	Jumlah produk hukum yang disusun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	100%	100%	24 Dokumen	83,50	1.101.378.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	24 Dokumen		1.368.647.000
4	1	2	2.03	2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disusun	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	100%	100%	25 Kasus	83,50	647.431.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	25 Kasus		680.550.000

4	1	2	2.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang disusun	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	100%	100%	400 Dokumen	83,50	529.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks RB	400 Dokumen	864.882.000
Total Pagu Anggaran														4.287.146.470			5.542.435.000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah: “Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis *Smart City*”.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Madiun
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Kode				Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A (Skor)	2.251.125.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Pohukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	A (Skor)	2.628.356.000
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Pohukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	100%	1.500.000
4	1	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Pohukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	6 Laporan	1.500.000
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	945.125.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Pohukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Pemerintah Daerah	100%	1.321.633.000

4	1	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang/bulan	945.125.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	masyarakat di Jawa Timur	berbasis smart city	Pemerintah Daerah	15 Orang/Bulan	1.321.633.000
4	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	341.100.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	100%	454.500.000
4	1	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	341.100.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	48 Laporan	454.500.000
4	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100%	377.800.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	100%	255.592.000
4	1	1	2.07	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	79.600.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis smart city	Pemerintah Daerah	3 Unit	83.300.000

											masyarakat di Jawa Timur					
4	1	1	2.07	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	195.600.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	10 Unit	130.110.000
4	1	1	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	102.600.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	13 Unit	42.182.000
4	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	500.100.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	100%	496.801.000
4	1	1	2.08	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	500.100.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	250 Laporan	496.801.000
4	1	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100%	86.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	100%	98.330.000

4	1	1	2.09	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	43.000.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	4 Unit	43.000.000
4	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	1 Unit	2.500.000
4	1	1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	40.500.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	43 Unit	52.830.000
4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	2.506.349.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	100%	2.914.079.000
4	1	2	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang disusun	100%	2.506.349.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	100%	2.914.079.000

4	1	2	2.03	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	1.119.256.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	24 Dokumen	1.368.647.000	
4	1	2	2.03	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	647.431.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	25 Kasus	680.550.000	
4	1	2	2.03		Sub Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	739.662.000	Kota Madiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Penguatan penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis <i>smart city</i>	Pemerintah Daerah	400 Dokumen	864.882.000	
Total Pagu Anggaran								4.757.474.000	Total Pagu Anggaran								5.542.435.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan bersama *stakeholder* terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan *Top Down*, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka tujuan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2024 mengacu pada tujuan Sekretariat Daerah Kota Madiun, yaitu “Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; dan
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Demikian Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024.

Kepala Bagian Hukum,



BUDI WIBOWO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP 197501171996021001